

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kasus penyebaran penyakit Covid-19 sedang menjadi masalah utama di dunia termasuk di Indonesia. Covid-19 sendiri disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit kepada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Dalam artikel World Health Organization (WHO) yang berjudul Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus, coronavirus jenis baru telah ditemukan dan dapat menyebabkan penyakit COVID-19 (WHO, n.d.) Secara global per tanggal 13 April 2020, penyakit ini terkonfirmasi sudah menjangkit 1.773.084 orang di seluruh dunia dengan korban jiwa sebanyak 111.652 orang. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 4.241 orang yang telah terjangkit dan 373 orang meninggal dunia akibat penyakit ini (WHO, 2020, pp. 4).

Dalam usaha mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia, kementerian kesehatan Indonesia memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk melakukan PSBB, yang diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 (Kementerian Kesehatan, 2020, pp. 1-10). PSBB merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Dalam artian singkatnya PSBB menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di wilayah berlakunya kebijakan tersebut untuk membatasi kegiatan yang melibatkan sekerumunan orang berada di suatu tempat. Kegiatan yang dibatasi dalam peraturan PSBB adalah meliburkan sekolah dan perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi (Listyorini, 2020, pp. 6-9).

Adanya wabah yang memiliki tingkat transmisi tinggi tentu menyebabkan berbagai sektor dalam kehidupan manusia terganggu. Untuk mencegah percepatan transmisi virus tersebut tentu membatasi pergerakan manusia menjadi salah satu langkah awal untuk mengurangi percepatan penyebaran virus. Terbatasnya mobilitas manusia akan mempengaruhi berbagai sektor lain dalam keseharian manusia, salah satunya dalam sektor ekonomi.

Dalam pemberitaan di *okezone.com*, salah satu industri ekonomi yang paling parah terkena dampak Covid-19 adalah sektor pariwisata dan perhotelan (Agustian, 2020, pp. 3-4). Hal tersebut diukur dari seberapa penting banyak manusia berkumpul di satu tempat, seberapa penting interaksi secara langsung, dan pentingnya mobilitas dalam industri tersebut. Pada akhirnya industri pariwisata dan perhotelan lah yang memiliki dampak paling tinggi.

Tidak hanya itu, pekerja profesi informal yang terkena dampak dari kebijakan PSBB tidak sedikit. Dalam artikel berita di *WartaEkonomi.co.id*, para pekerja harian

lepas, UMKM, pedagang asongan, dan ojek *online* juga mengalami penurunan pendapatan secara signifikan (Isna, 2020, pp. 3-6).

Selain itu efek samping sosial juga dirasakan dari sektor pendidikan. Nuryana (2020, pp. 13-18) dalam Kabar Priangan berpendapat bahwa *stakeholder* dunia pendidikan juga mengalami kerugian dari pemberlakuan PSBB. Guru, orangtua, sekolah, dan pemerintah merupakan bagian yang terdampak dari kebijakan tersebut. Menurutnya, banyak orangtua yang tidak sanggup mengatur anak mereka selama masa belajar secara daring, guru-guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi, dan sekolah dalam hal manajemennya.

Tentunya dalam penanganan wabah seperti COVID-19, peranan media menjadi elemen penting dalam penyaluran informasi. Dengan adanya media informasi akan lebih cepat disebar dan memperluas jangkauannya. Media dapat membantu menyalurkan informasi tersebut melalui berbagai macam platform seperti televisi, radio, koran, dan dimasa modern ini melalui media daring. Proses komunikasi tersebut meliputi pengemasan pesan oleh media dan proses *encoding* dari khalayak yang menerima pesan dari media (Rakhmat, 2006, p. 176).

Khalayak yang menerima informasi akan kebijakan pemerintah tersebut tidak langsung setuju terhadap pemberlakuan larangan tersebut. Dalam sebuah artikel yang dipublikasi oleh remotivi, Rizky (2020, pp. 5) melihat adanya polarisasi terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut. Polarisasi tersebut terlihat dari banyaknya kicauan dari media sosial twitter sebagaimana ada penyangkalan atas kebijakan antar pemegang

kekuasaan. Ada kubu pendukung pro Anies mendukung akan pemberlakuan *Lockdown* dan kubu dari Jokowi tidak.

Kebijakan PSBB sendiri menuai dilema yang membuat sebagian masyarakat yang berpenghasilan harian dirugikan. Beberapa sektor bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan transportasi juga terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam artikel berita Media Indonesia, Komnas HAM merasa adanya dualisme kebijakan terkait transportasi pada penerapan PSBB (Irianto, 2020, pp. 1). Dualisme tersebut berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat dan penegak hukum dalam penerapan kebijakan PSBB.

Tak lama setelah PSBB berlaku, pemerintah kembali mengeluarkan wacana pelanggaran terhadap PSBB. Hal mendapatkan sorotan oleh media secara negatif. Dalam artikel berita “*Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19*” (Hakim, 2020, pp. 11-19), dikatakan bahwa ancang-ancang pemerintah untuk melonggarkan PSBB dinilai tidak tepat karena tingkat penyebaran covid-19 masih tinggi di Indonesia. Rendahnya angka tes orang yang didiuga terjangkit pun juga masih rendah, sehingga dikhawatirkan angka yang saat ini muncul bukan angka yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan ketakutan tidak terkontrolnya tingkat penyebaran Covid-19. Nada yang sama juga dikeluarkan *Okezone.com*. Dalam artikel yang berjudul “*Pelonggaran PSBB Bikin Bingung, Penanganan Covid-19 Bisa Ambyar*” (Hidayat, 2020, pp. 3-5), dari saran WHO untuk tidak mencabut status *lockdown*. Walaupun Indonesia yang tidak menerapkan *lockdown* dan berhasil

menurunkan angka penyebaran Covid-19, dikhawatirkan tren angka yang naik akan kembali terjadi jika wacana pelonggaran PSBB dilaksanakan. CNN juga mengkritik bahwa Indonesia belum siap melonggarkan PSBB karena dinilai belum mampu menunjukkan angka sebenarnya dari orang-orang yang terjangkit Covid-19 pada artikel “*Pelonggaran PSBB, Antara Kurva Corona dan Beban Berat Ekonomi*” (CNN Indonesia, 2020, pp. 6-15). Hal ini karena angka yang ditampilkan selama ini belum memenuhi standar ilmu epidemiologi. Sehingga sangat riskan untuk melonggarkan PSBB.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Spratt (2001, p. 75), saat pandemi influenza pada tahun 1918 beberapa media seperti *The New York Times*, *Science*, dan *Survey* memberitakan berdasarkan narasumber ahli dan fakta empiris namun tetap mengkonstruksi konflik politik dan kepentingan di dalamnya. Dari penelitian Spratt dapat dilihat bahwa setiap media memiliki kuasa dalam membentuk isu dalam pemberitaan pandemi. Begitu pula di Indonesia, media bebas mengontrol sudut pandang dari pemberitaan pandemi. Namun pada tanggal 3 Maret 2020 Dewan Pers membuat siaran pers agar media tetap memperhatikan kode etik jurnalisisme dalam praktik pemberitaan mengenai isu COVID-19.

Menurut Arifin (2011, p. 159) media masa dipandang memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun opini dan pengetahuan bagi khalayak. Media massa berkontribusi pada cara khalayak memandang, menyeleksi dan memberikan opini. Wicks mengatakan bahwa realitas sosial dalam diri khalayak berkembang ketika pesan

dari media berinteraksi dengan pengetahuan serta kepercayaan yang dipegang oleh khalayak (Wicks, 2010, p. 1). Namun menurut Eriyanto (2002, p. 333) masyarakat bukanlah pihak yang pasif menerima informasi begitu saja. Sebaliknya masyarakat menggunakan penafsirannya untuk memahami pesan yang mereka terima. Sehingga bingkai yang dihasilkan oleh masyarakat berbeda dengan bingkai yang dihasilkan oleh media. Dalam temuannya Aarøe (2017, p. 5) mengatakan bahwa kecenderungan politik seperti nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, motivasi, pengetahuan, dan keyakinan, membentuk bingkai mana yang diterima orang dan mana yang mereka tolak. Nilai yang kuat lah yang dapat meningkat penerimaan bingkai konfirmasi dan resistensi terhadap penolakan bingkai (Shen dan Edward dalam Aarøe 2017, p. 4).

Melihat banyaknya pemberitaan yang mengungkit pelanggaran kebijakan PSBB yang bernada negatif, peneliti merasa perlu mengetahui bagaimana khalayak menyikapi hal tersebut. Melalui studi ini, peneliti ingin meneliti khalayak media dan ingin mengetahui bagaimana khalayak yang tinggal di daerah PSBB diterapkan dan daerah yang tidak menerapkan terhadap pemberitaan terkait pelanggaran kebijakan PSBB..

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis resepsi dari Stuart Hall untuk melihat pemaknaan dan pemahaman khalayak terhadap berita dalam bentuk teks yang telah dipilih sebagai sampel. Untuk mendapatkan reaksi individu terhadap teks yang telah dipaparkan, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data melalui

wawancara mendalam kepada informan. Peneliti telah menentukan isu terkait pelanggaran kebijakan PSBB dan informan yang sesuai dengan kriteria.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana resepsi khalayak terhadap pemberitaan pelanggaran kebijakan PSBB?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Terdapat dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini:

1. Bagaimana posisi khalayak yang menerapkan PSBB dan yang tidak terhadap pemberitaan pelanggaran kebijakan PSBB?
2. Apakah ada faktor yang mempengaruhi posisi khalayak terhadap pemberitaan pelanggaran kebijakan PSBB?

1.4 Tujuan Penelitian

Penting adanya tujuan dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut digunakan sebagai acuan agar penelitian memiliki arah yang jelas. Berikut merupakan tujuan penelitian dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana posisi khalayak yang menerapkan PSBB dan yang tidak terhadap pemberitaan pelanggaran kebijakan PSBB?

2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi posisi khalayak terhadap pemberitaan pelanggaran kebijakan PSBB?

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu harus ada kegunaan dari karya ilmiah tersebut. peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melihat resepsi khalayak sebagai keseluruhan yang utuh dengan memanfaatkan teori resepsi multidimensi milik Carolyn Michelle. Peneliti juga ingin melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan posisi khalayak dalam menerima teks. Kemudian dari adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penggunaan teori analisis multidimensi di Indonesia . Penelitian terhadap pemberitaan pandemi tidak selalu terjadi dan memiliki potensi adanya hal baru yang ditemukan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini mencoba untuk meninjau pemaknaan khalyak terhadap pemberitaan terkait pandemi di media daring. Dengan meneliti pemberitaan terkait PSBB dan resepsi khalayak, diharapkan agar media dapat menuliskan berita yang lebih baik dalam kasus yang menyinggung kebijakan kesehatan.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, keterbatasan dari penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat bertemu secara tatap muka dengan narasumber dikarenakan pemberlakuan kebijakan PSBB. Selain itu masalah transmisi melalui media daring memungkinkan terjadinya hilangnya informasi ditengah wawancara.